

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

**MUNAWIR JAUHARI  
NIM: 18622258**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI  
PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN  
DAN ASET DAERAH (BPKAD)  
KOTA TANJUNGPINANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi  
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Akuntansi

OLEH

**MUNAWIR JAUHARI**

**NIM: 18622258**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI**



**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI (STIE) PEMBANGUNAN  
TANJUNGPINANG  
2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH (BPKAD) KOTA TANJUNGPINANG**

Diajukan Kepada :

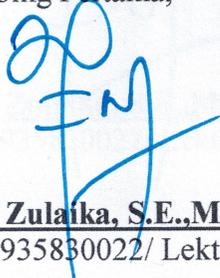
Panitia Komisi Ujian  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan  
Tanjungpinang

Oleh :

Nama : MUNAWIR JAUHARI  
NIM : 18622258

Menyetujui :

Pembimbing Pertama,



Nurfitri Zulatika, S.E., M.Ak.Ak.CA  
NIDK. 8935830022/ Lektor

Pembimbing Kedua,



Masviah As Sahara, S.E., M.Si  
NIDN. 1010109101/ Lektor

Mengetahui,

Ketua Program Studi


Hendy Satria, S.E., M.Ak., CAO  
NIDN. 1015069101/Lektor

**PENGESAHAN KOMISI UJIAN**

**Skripsi Berjudul**

**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN  
DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN  
ASET DAERAH (BPKAD) KOTA TANJUNGPINANG**

Yang Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

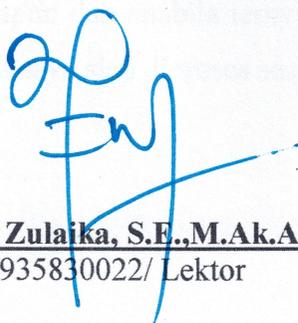
Nama : Munawir Jauhari

NIM : 18622258

Telah di Pertahankan di Depan Panitia Komisi Ujian Pada Tanggal Tiga Belas  
Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan  
Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

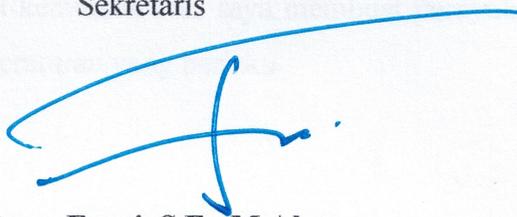
**Panitia Komisi Ujian**

Ketua



Nurfitri Zulaika, S.E., M.Ak. Ak CA  
NIDK. 8935830022/ Lektor

Sekretaris



Fauzi, S.E., M.Ak  
NIDK. 8928410021/ Asisten Ahli

Anggota



Aulia Dewi Gizta, S.E., M.Ak  
NIDN. 10011089501/ Asisten Ahli

Tanjungpinang, 13 Januari 2023  
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang  
Ketua



Charly Marlinda, S.E., M. Ak., Ak. CA.  
NIDN. 1029127801 / Lektor

## PERNYATAAN

Nama : Munawir Jauhari  
NIM : 18622258  
Tahun Angkatan : 2018  
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,25  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Implementasi Aplikasi Sistem Informasi  
Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan  
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)  
Kota Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa seluruh isi dan materi dari skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan bukan rekayasa maupun karya orang lain. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan apabila ternyata di kemudian hari saya membuat pernyataan palsu, maka saya siap diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Tanjungpinang, 13 Januari 2023

Penulis,



**MUNAWIR JAUHARI**  
**NIM. 18622258**

## HALAMAN PERSEMBAHAN



Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena atas izin dan Ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir berupa Skripsi dengan tepat waktu. Puji syukur tak terhingga saya ucapkan karena Engkau menghadirkan orang-orang terbaik yang mau menemani dan memberikan motivasi disaat senang maupun susah sehingga saya mampu menyelesaikan kewajibanku dengan baik.

Kupersembahkan skripsi ini kepada orang tua saya tersayang Ayah Marzul Hendri dan Mama Restuty, yang selalu memberi dukungan sepanjang waktu dan sebagai tanda bakti dan rasa terima kasih atas semua pengorbanan yang telah diberikan sehingga dapat melewati masa perkuliahan dan hingga skripsi ini terselesaikan. Semoga bisa membuat Ayah dan Mama selalu bahagia.

Terima kasih juga untuk semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih atas semua doanya.

## HALAMAN MOTTO

**“ Rasulullah bersabda: Barang siapa menempuh jalan untuk mendapat ilmu,  
Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga “**

**(HR.Muslim)**

**"Bersyukurlah ketika merasa lelah, tidak semua orang bisa sekuat kamu."**

**(Warwir)**

**"Jika diammu bijak, maka diamlah. Apabila diammu diinjak, maka bicaralah  
supaya tak ada lagi orang yang menginjak dan meremehkan dirimu."**

**(Jainal Abidin)**

**"Cara terbaik untuk memulai adalah dengan berhenti berbicara dan mulai  
melakukan."**

**(Walt Disney)**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA TANJUNGPINANG**”. Penyusunan penelitian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan STRATA-1 pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, Program Studi Akuntansi.

Dalam proses penyusunan proposal usulan penelitian ini tentunya tidak lepas dari dukungan banyak pihak. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

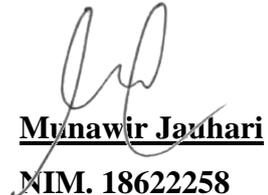
1. Ibu Charly Marlinda, S.E., M.Ak., Ak., CA. selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
2. Ibu Ranti Utami, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang .
3. Ibu Sri Kurnia, S.E., M.Si.Ak.CA. selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
4. Bapak Ir. Imran Ilyas, M.M selaku selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pembangunan Tanjungpinang.
5. Bapak Hendy Satria, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi.

6. Nurfitri Zulaika, S.E.,M.Ak., Ak., CA selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan perbaikan selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Masyitah As Sahara, S.E.,M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan, saran, dan perbaikan selama penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis sadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulisan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Tanjungpinang, 13 Januari 2023

Penulis,



**Munawir Jauhari**  
**NIM. 18622258**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN / PENGESAHAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN KOMISI UJIAN</b>	
<b>PERNYATAAN</b>	
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b>	
<b>HALAMAN MOTTO</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah .....	6
1.4 Tujuan Penelitian .....	6
1.5 Kegunaan Penelitian .....	6
1.5.1 Kegunaan Ilmiah.....	6
1.5.2 Kegunaan Praktis .....	7
1.6 Sistematika Penulisan .....	7

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
2.1 Tinjauan Teori.....	9
2.1.1 <i>Stewardship Theory</i> .....	9
2.1.2 Akuntansi Publik.....	10
2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Publik.....	10
2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik .....	13
2.1.2 Implementasi.....	14
2.1.2.1 Pengertian Implementasi .....	14
2.1.2.2 Model-Model Implementasi Publik.....	15
2.1.3 Sistem Informasi .....	24
2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi .....	24
2.1.3.2 Tujuan Sistem Informasi .....	25
2.1.4 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) .....	27
2.1.4.1 Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	27
2.1.4.2 Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) .....	28
2.1.4.3 Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).....	30
2.2 Kerangka Pemikiran.....	30
2.3 Penelitian Terdahulu .....	31
 <b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	 <b>37</b>
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Jenis dan Sumber Data.....	37



5.1 Kesimpulan .....	65
5.2 Saran .....	66

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

***CURRICULUM VITAE***

## DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan dengan Indikator Komunikasi.....	53
Tabel 4. 2 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan dengan Indikator Sumber Daya.....	54
Tabel 4. 3 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan dengan Indikator Disposisi .....	57
Tabel 4. 4 Rekapitulasi Hasil Wawancara Informan dengan Indikator Struktur Birokrasi.....	59

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran.....	31
Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang.....	46

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Wawancara

Lampiran 2 : Hasil Wawancara

Lampiran 3 : Dokumentasi Wawancara

Lampiran 4 : Surat Pernyataan Selesai Penelitian

Lampiran 5 : Persentase Plagiat

## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH (SIPD) PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD) KOTA TANJUNGPINANG**

Munawir Jauhari, 18622258. S1 Akuntansi. STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[munawirj18@gmail.com](mailto:munawirj18@gmail.com)

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Memakai teori Edward III berupa Komunikasi, Sumber Daya manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Teori ini digunakan untuk melihat dimana terdapat kendala dalam implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Hasil dari analisis Implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tanjungpinang dari keempat indikator teori Edward III meliputi dimensi Komunikasi, Sumber Daya Manusia, Disposisi dan Struktur Birokrasi masih terjadi kendala di dimensi komunikasi; sumber daya; dan disposisi. Secara signifikan, dan juga terjadi hambatan pada dimensi lain yaitu berupa waktu dalam menggunakan aplikasi SIPD. Sehingga, sangat dibutuhkan pelatihan Khusus untuk memberikan pemahaman lebih bagi pengguna aplikasi SIPD khususnya pengguna di instansi terkait.

**Kata Kunci : Implementasi, Aplikasi, SIPD, BPKAD, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang**

Dosen Pembimbing 1 : Nurfitri Zulaikha, S.E., M.Ak, Ak., CA

Dosen Pembimbing 2 : Masyitah As Sahara, S.E., M.Si

## **ABSTRACT**

### **IMPLEMENTATION OF REGIONAL GOVERNMENT INFORMATION SYSTEM (SIPD) APPLICATION AT TANJUNGPINANG CITY REGIONAL FINANCIAL AND ASSET MANAGEMENT AGENCY (BPKAD)**

Munawir Jauhari, 18622258. S1 Accounting. STIE Pembangunan Tanjungpinang  
[munawirj18@gmail.com](mailto:munawirj18@gmail.com)

*The purpose of this study was to find out the application of the Regional Government Information System Application (SIPD) in the Tanjungpinang City Regional Financial and Asset Management Agency.*

*This type of research is a qualitative descriptive research. The object of this research is the Tanjungpinang Regional Financial and Asset Management Agency. This study uses primary data and secondary data. Using Edward III's theory of Communication, Human Resources, Disposition and Bureaucratic Structure. This theory is used to see where there are obstacles in the implementation of the Regional Government Information System (SIPD) application.*

*The results of the analysis of the Implementation of the Regional Government Information System (SIPD) application at the Tanjungpinang City Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) from the four indicators of Edward III's theory include the dimensions of Communication, Human Resources, Disposition and Bureaucratic Structure, there are still obstacles in the communication dimension; resource; and disposition. Significantly, there are also obstacles in other dimensions, namely in the form of time in using the SIPD application. So, special training is really needed to provide more understanding for users of the SIPD application, especially users in related agencies.*

*Keywords : implementation, application, SIPD, BPKAD*

*Supervisor 1 : Nurfitri Zulaikha, S.E., M.Ak,Ak.,CA*

*Supervisor 2 : Masyitah As Sahara, S.E., M.Si*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan akuntansi sektor publik, di Indonesia semakin pesat dengan adanya reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Seiring dengan bergulirnya era desentralisasi dan otonomi daerah, pengembangan sistem informasi sangat dibutuhkan dalam pemerintahan. Selain itu, maraknya globalisasi yang menuntut daya saing dalam setiap negara juga menuntut daya saing setiap Pemerintah Daerah, dimana daya saing Pemerintah Daerah ini diharapkan akan mampu tercapai melalui peningkatan kemandirian pemerintahan.

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengelola data pembangunan daerah menjadi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan evaluasi mengoptimalkan pemerintah daerah. Tujuan SIPD adalah mengoptimalkan pemanfaatan data dan informasi pemerintah daerah.

Terbitnya beberapa peraturan hukum, seperti :

1. Undang-Undang Nomor. 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 2008, tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 54 tahun 2010, tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 8 Tahun 2014, Sistem Informasi Pembangunan Daerah

Peraturan di atas membawa implementasi kepada daerah atas kewajiban pemenuhan data dan informasi, dimana pemerintah daerah berkewajiban menyediakan informasi tentang pemerintahan daerah, yaitu informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Lalu informasi daerah tersebut wajib dikelola dalam suatu sistem informasi pemerintah daerah. Data SIPD inilah yang akan diolah dan disajikan dalam bentuk informasi pembangunan daerah.

Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dipertegas melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Fungsi SIPD untuk pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat menyatukan referensi nasional, proses perencanaan dan keuangan daerah lebih mudah dilakukan secara eksternal, evaluasi perencanaan keuangan, kinerja dan produk hukum yang dilakukan melalui sistem eksternal, *database* pembangunan nasional dan daerah serta analisa data daerah secara nasional dapat dilakukan lebih mudah.

SIPD diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan proses perencanaan dan penganggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan perencanaan

pemerintah. SIPD juga diharapkan dapat berperan dalam menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga menghasilkan layanan informasi pemerintahan daerah yang saling terintegrasi serta menyediakan data kelola pemerintahan yang efisien.

Peraturan pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah dapat dikelola dengan mengadopsi beberapa dasar utama dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, diantaranya keterbukaan, rasa tanggung jawab dengan mengamati asas keadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat, keterlibatan, dan kepatuhan (Muslih et al., 2020).

Seiring adanya perubahan reformasi birokrasi maka pengelolaan keuangan daerah dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pertanggungjawaban dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sistem informasi manajemen yang canggih sehingga masyarakat dapat memperoleh layanan informasi terkait dengan pengelolaan keuangan daerah secara cepat, tepat, dan transparansi (Wartini & Yasa, 2016). Dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah, perlu dilakukan strategi untuk merencanakan prioritas dan kebutuhan pembangunan daerah sehingga dalam proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat SKPD maka dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat lebih terarah (Ekaputra, 2021).

Salah satu mekanisme yang memudahkan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang dalam mengelola data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan pemerintahan lainnya yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). SIPD adalah sistem informasi

yang berbasis web dengan data waktu terkini dan dapat diakses melalui situs jaringan resmi Kementerian Dalam Negeri. Adapun SIPD dibangun untuk memudahkan SKPD dalam menyampaikan informasi berbentuk dokumentasi, administrasi serta mengelola data pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil suatu keputusan (Wurara et al., 2020). Penerapan aplikasi SIPD sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia sejak media tahun 2020 yaitu dimulai dengan penyusunan APBD tahun anggaran 2021. SIPD berfungsi sebagai media akuntabilitas publik yang menjadi transparansi informasi kepercayaan publik terhadap evaluasi kinerja pemerintah, program-program pembangunan, dan pencapaian pembangunan (Sudianing & Seputra, 2019).

Dengan melihat kondisi saat ini, dimana APBD tahun anggaran 2021 adalah tahun pertama dalam penerapan SIPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengamanatkan bahwa harus satu aplikasi saja yang beroperasi pada bidang subbagian program dan keuangan. SIPD diprogramkan oleh pemerintah pusat agar memudahkan Sumber Daya Manusia dalam pekerjaan akan tetapi, dalam penerapan SIPD tidak berjalan dengan baik seperti halnya dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran setiap SKPD dimana pelaksanaan APBD 2021 aplikasi yang digunakan sangat jauh berbeda dengan aplikasi yang digunakan dalam pelaksanaan APBD 2020, yaitu dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dan mempunyai hambatan dalam penatausahaan keuangan daerah di aplikasi SIPD.

Dalam rangka mengelola keuangan daerah secara transparan dan bertanggung jawab, pemerintah memanfaatkan perkembangan teknologi yang saat ini berkembang pesat, teknologi di bidang keuangan adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). SIPD Otoritas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang masih dalam tahap uji coba seperti sebelumnya menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah). Penerapan aplikasi berbasis web ini bertujuan untuk meningkatkan dan mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik oleh Pemerintah, namun pengelolaan program ini tidaklah mudah, diperlukan kerjasama dan kerja keras dari instansi terkait (Nasution & Nurwani, 2021).

Penggunaan aplikasi web ini dimaksudkan untuk mempercepat dan mempermudah pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan publik oleh pemerintah khususnya di kota Tanjungpinang, namun untuk dapat melaksanakan program ini tidak mudah, diperlukan kerjasama dan kerja keras, berdasarkan pengamatan awal. penulis melihat beberapa kendala yaitu karena sebelumnya BPKAD Kota Tanjungpinang, masih menggunakan SIMDA dan tidak ada masalah dalam menggunakannya, namun pada awal tahun 2021 Kementerian Dalam Negeri mewajibkan semua instansi harus menggunakan aplikasi terbaru yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) karena aplikasi ini masih dalam versi beta, sehingga institusi di Pemerintah Daerah menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya.

Dari latar belakang yang dipaparkan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian **“Implementasi Aplikasi Sistem**

## **Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dari itu rumusan masalah pada penelitian ini yaitu “Bagaimana Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang ?”.

### **1.3 Batasan Masalah**

Maka peneliti menggunakan fokus penelitian pada Model Implementasi Publik menggunakan teori George C. Edward III, yaitu: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokasi sebagai acuan dalam melaksanakan penelitian.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut adapun tujuan dilakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

#### **1.5.1 Kegunaan Ilmiah**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara ilmiah mengenai Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi bagi peneliti yang

melakukan penelitian bersama dengan variabel dan pemecahan masalah yang berbeda.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

1. Bagi Penulis

Untuk menerapkan teori yang telah diperoleh di bangku perkuliahan dalam praktik yang sesungguhnya khususnya pada objek yang diteliti.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Bagi Pihak Luar

Sebagai referensi bagi pihak akademis maupun pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lanjut mengenai topik yang sama.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, pembahasan dan penyajian diuraikan dalam lima bab dengan sistematika penulisan dan aturan-aturannya untuk memudahkan pembaca agar lebih mudah memahami dan mengerti penelitian ini. Adapun gambaran sistematika penulisan secara garis besar adalah:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Berisikan tentang latar belakang masalah yang mendasari penelitian ini, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN PUSTAKA**

Berisikan tentang kajian teori yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan oleh penulis yang dapat menjadi landasan teoritis dalam melakukan penelitian, kerangka pemikiran, dan penelitian terdahulu.

**BAB III            METODOLOGI PENELITIAN**

Berisikan tentang metode penelitian yang digunakan, yang merupakan bab yang menjelaskan jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis yang digunakan.

**BAB IV            HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisikan tentang hasil penelitian meliputi gambaran umum objek penelitian dan analisa hasil penelitian serta pembahasan

**BAB V            PENUTUP**

Berisikan tentang kesimpulan yang diambil dari hasil pembahasan masalah sebelumnya, serta saran-saran mengenai perbaikan yang penulis lakukan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Teori**

##### **2.1.1 *Stewardship Theory***

Menurut Ghozali (2020) *Stewardship* teori sama seperti *agency theory* yaitu hubungan dua pihak prinsipal (pemilik) dan *steward* (manajer, Davis et al., 1997) bedanya dengan agen, *steward* berperilaku sesuai dengan kepentingan prinsipal. *Steward* termotivasi untuk memaksimalkan kinerja organisasi, sehingga memuaskan kepentingan pemegang saham (pemilik). Teori *stewardship* menyatakan bahwa *steward* akan berperilaku sosial yaitu perilaku dimana *steward* mengikuti keinginan prinsipal atau perusahaan. Kinerja perusahaan seperti maksimum pertumbuhan penjualan atau profitabilitas menjadi outcome yang diinginkan dalam perspektif *steward*. Teori *stewardship* mengatakan bahwa dampak positif pada kinerja karena kedua pihak baik prinsipal maupun *steward* bekerja untuk mencapai tujuan yang sama.

Perilaku *steward* (pelayan) didasari karena dua faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor situasional. Pada faktor psikologis, teori *stewardship* menerapkan perspektif kekuatan pribadi, menggambarkan kekuatan berdasarkan hubungan interpersonal yang berkembang seiring waktu, yang pada gilirannya mempengaruhi dan memberdayakan manajer *steward* (pelayan). Faktor psikologis ini memudahkan pemilihan *stewardship*, yang pada akhirnya berdampak positif pada kinerja perusahaan.

Pada faktor situasional menggambarkan struktur organisasi dan termasuk filosofi dan budaya manajemen. Dalam organisasi dilambangkan dengan kolektivisme, individu menempatkan tujuan kolektif di atas tujuan pribadi, penekanannya adalah pada memiliki, mengidentifikasi dan menampilkan kesetiaan karena kerangka kerja sosial yang ada di organisasi.

Teori *stewardship* didasari oleh model humanistik manusia karena landasannya dalam sosiologi dan psikologi. Model ini mengasumsikan bahwa individu termotivasi oleh pemenuhan kebutuhan tingkat tinggi. Dalam hubungan prinsip dan *steward*, seorang *steward* akan menempatkan kepentingan prinsipal di atas kepentingan pribadi. Prinsipal akan menciptakan struktur organisasi dimana perilaku *stewardship* ini dapat berkembang. Dengan demikian, struktur *stewardship* dilihat sebagai kolektivistik dan kooperatif, serta menghasilkan manfaat yang positif bagi organisasi.

## **2.1.2 Akuntansi Publik**

### **2.1.1.1 Pengertian Akuntansi Publik**

Menurut Siregar (2017) Akuntansi sektor publik merupakan aktivitas akuntansi yang dilakukan terhadap kejadian dan transaksi keuangan organisasi sektor publik. Menurut (Handayani, 2019), akuntansi sektor publik adalah sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik.

Menurut Mardiasmo (2017), Akuntansi sektor publik adalah aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklarifikasi, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan

yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan, yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi negara.

Menurut Biduri (2018) Akuntansi sektor publik adalah mekanisme teknik dan analisis akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial pada proyek-proyek kerjasama sektor publik dan swasta.

Menurut Kawatu (2019) Sektor publik merupakan organisasi yang kompleks dan heterogen. Kompleksitas sektor publik tersebut menyebabkan kebutuhan informasi untuk perencanaan dan pengendalian manajemen lebih bervariasi. Demikian juga bagi *stakeholder* sektor publik, mereka membutuhkan informasi yang lebih bervariasi, handal, dan relevan, untuk pengambilan keputusan. Tugas dan tanggung jawab akuntan sektor publik adalah menyediakan informasi baik untuk memenuhi kebutuhan internal organisasi maupun kebutuhan pihak eksternal.

### **2.1.1.2 Karakteristik Akuntansi Sektor Publik**

Menurut Biduri (2018) Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan untuk mencapai hasil tertentu dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi. Komponen lingkungan yang mempengaruhi organisasi sektor publik meliputi:

1. Faktor ekonomi meliputi antara lain :
  - a. Pertumbuhan ekonomi
  - b. Tingkat inflasi
  - c. Tenaga kerja
  - d. Nilai tukar mata uang
  - e. Infrastruktur
  - f. Pertumbuhan pendapatan per kapita (GNP/GDP)
2. Faktor politik meliputi antara lain :
  - a. Hubungan negara dan masyarakat
  - b. Legitimasi pemerintah
  - c. Tipe rezim yang berkuasa
  - d. Ideologi Negara
  - e. Elit politik dan massa
  - f. Jaringan Internasional
  - g. Kelembagaan
3. Faktor kultural meliputi antara lain :
  - a. Keragaman suku, ras, agama, bahasa dan budaya
  - b. Sistem nilai di masyarakat
  - c. Historis
  - d. Sosiologi masyarakat
  - e. Karakteristik masyarakat
  - f. Tingkat pendidikan

4. Faktor demografi meliputi antara lain :

- a. Pertumbuhan penduduk
- b. Struktur usia penduduk
- c. Migrasi
- d. Tingkat kesehatan

Menurut Hantono (2021) Akuntansi sektor publik memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi yang digunakan sektor swasta. Perbedaan utamanya terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu akuntansi tersebut. Akuntansi sektor publik biasanya digunakan oleh lembaga pemerintah daerah dan pusat dimana karakteristik akuntansi sektor publik ini berfokus pada dua hal yaitu:

1. Fokus pada sifat lembaga dimana fokus pada sifat akuntansi ini adalah khusus organisasi non profit yang tidak menghasilkan laba seperti lembaga pemerintahan.
2. Fokus pada tujuan lembaga dimana fokus untuk sektor publik hanya menyediakan informasi pelayanan pada publik. Pelayanan untuk publik ini dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat.

#### **2.1.1.3 Tujuan Akuntansi Sektor Publik**

Menurut *American Accounting Association* dalam (Mardiasmo, 2018) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk :

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomi atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang

dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen (*management control*).

2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif atas program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memungkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas (*accountability*).

## **2.1.2 Implementasi**

### **2.1.2.1 Pengertian Implementasi**

Menurut Syahrudin (2019) Implementasi merupakan tahap merealisasi tujuan program, perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan menghitung secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan, termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas untuk melaksanakan program. Implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan dari apa yang telah diputuskan legislatif atau para pengambil keputusan sehingga kurang berpengaruh. Padahal dalam kenyataan dapat kita lihat sendiri bahwa betapa pun hebatnya suatu rencana program atau kegiatan tetapi apabila itu tidak direalisasikan dengan baik dan benar maka program atau kegiatan itu menjadi sia-sia. Implementasi membutuhkan para pelaksana yang benar-benar jujur, memiliki kompetensi yang sesuai, komitmen yang tinggi untuk menghasilkan apa yang menjadi tujuannya,

dan benar-benar memperhatikan rambu-rambu peraturan pemerintah yang berlaku.

Menurut Pressman dan Wildavsky dalam Purwanto & Sulisyastuti (2015) implementasi dimaknai dengan beberapa kata kunci sebagai berikut: untuk menjalankan kebijakan (*to carry out*), untuk memenuhi janji-janji sebagaimana dinyatakan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), untuk menghasilkan output sebagaimana dinyatakan dalam tujuan kebijakan (*to produce*), untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (*to complete*).

Menurut Mulyadi dalam Chasanah et al. (2017) Implementasi merupakan tahap realisasi tujuan-tujuan program. Dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah persiapan implementasi, yaitu memikirkan dan memperhitungkan secara matang berbagai kemungkinan keberhasilan dan kegagalan termasuk hambatan atau peluang-peluang yang ada dan kemampuan organisasi yang disertai tugas melaksanakan program.

### **2.1.2.2 Model-Model Implementasi Publik**

Dalam studi implementasi kebijakan terdapat beberapa mode implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang melihat variabel apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja implementasi suatu kebijakan publik. Adapun beberapa pendapat para ahli adalah :

Ada enam variabel, menurut Van Meter & Van Horn, dalam (Agustino, 2020) yang mempengaruhi kinerja implementasi :

### 1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio kultur yang mengadakan ditingkat pelaksanaan kebijakan.

### 2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

### 3. Karakteristik Agen Pelaksana

Karakteristik Agen Pelaksana. Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk mengubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas, keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan.

#### 4. Sikap atau Kecenderungan (*Disposition*) Para Pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari (agen) pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan yang akan implementor laksanakan adalah kebijakan 'dari atas' (top down) yang sangat mungkin para pengambil keputusannya tidak pernah mengetahui (bahkan tidak mampu menyentuh) kebutuhan, keinginan, atau permasalahan yang warga ingin selesaikan.

#### 5. Komunikasi Antar-Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi merupakan mekanisme sekaligus syarat utama dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi dan komunikasi di antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil terjadi; dan begitu pula sebaliknya.

#### 6. Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik

Hal terakhir yang perlu juga diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam perspektif yang ditawarkan oleh van Metter & van Horn adalah sejauhmana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dan lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh

sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal.

Ada empat variabel, menurut George C. Edward III, dalam (Agustino, 2020) yang mempengaruhi kinerja implementasi :

#### 1. Komunikasi

Komunikasi, menurutnya, sangat keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten.

Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu :

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal ini disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (*street-level-bureuacrats*) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada

tataran tertentu, namun para pelaksana membutuhkan kejelasan informasi dalam melaksanakan kebijakan agar tujuan yang hendak dicapai dapat diraih sesuai konten kebijakan.

- c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten (untuk diterapkan dan dijalankan). Ini karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

## 2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III, dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber daya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf atau sumber daya manusia (SDM). Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya. Penambahan jumlah staf atau implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian serta kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabilitas) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk yaitu: (i) informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan

disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Dan (ii) informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.

- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor di mata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

### 3. Disposisi

Disposisi atau 'sikap dari pelaksana kebijakan' adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias. Indikator disposisi terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Efek Disposisi; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Oleh karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan; lebih khusus lagi pada kepentingan warga.
- b. Melakukan Pengaturan Birokrasi (*staffing the bureaucracy*); dalam konteks ini Edward III mensyaratkan bahwa implementasi kebijakan harus dilihat juga dalam hal pengaturan birokrasi. Ini merujuk pada penunjukan dan pengangkatan staf dalam birokrasi yang sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Selain itu, pengaturan birokrasi juga bermuara pada pembentukan sistem pelayanan publik yang optimal, penilaian personil dalam bekerja, hingga metode *by passing* personil.
- c. Insentif; Edward III menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (*self interest*) atau organisasi.

#### 4. Struktur Birokasi

Variabel keempat, menurut George C. Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapat kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber-sumber daya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan kordinasi dengan baik.

Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi atau organisasi ke arah yang lebih baik adalah:

- a. Membuat *Standard Operating Prosedures* (SOP) yang lebih fleksibel; SOP adalah suatu prosedur atau aktivitas terencana rutin yang memungkinkan para pegawai (atau elaksana kebijakan seperti aparatur, administratur, atau birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada setiap harinya

(*days-to-days politics*) sesuai dengan standar yang telah ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga).

- b. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya untuk menyebar tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan, atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dengan terfragmentasinya struktur birokrasi, maka implementasi akan lebih efektif karena dilaksanakan oleh organisasi yang kompeten dan kapabel.

Menurut Charles O. Jones (Agustino, 2020) dalam melaksanakan aktivitas implementasi program atau pelaksanaan kebijakan, terdapat tiga macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni :

1. Organisasi: aktivitas pengorganisasian (*organization*) merupakan suatu upaya menetapkan dan menata kembali sumber daya, unit-unit dan metode-metode yang mengarah pada upaya mewujudkan (merealisasikan kebijakan menjadi hasil sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan). Pembentukan atau penataan ulang sumber daya, unit, dan metode agar kebijakan dapat memberikan hasil atau dampak.
2. Interpretasi: aktivitas interpretasi (*interpretation*) merupakan aktivitas penjelasan substansi dan suatu kebijakan dalam bahasa yang lebih operasional dan mudah dipahami, sehingga substansi kebijakan dapat dilaksanakan dan diterima oleh para pelaku dan sasaran kebijakan. Menafsirkan bahasa kebijakan menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.

3. Penerapan: aktivitas aplikasi merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, pembayaran atau lainnya sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones di atas, maka masalah implementasi kebijakan publik atau implementasi program semakin lebih jelas dan luas. Di mana merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis dari pengorganisasian, interpretasi, dan aplikasi. Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

### **2.1.3 Sistem Informasi**

#### **2.1.3.1 Pengertian Sistem Informasi**

Sistem informasi menurut Gordon B. Davis dalam (Alfani & Nasution, 2022) adalah suatu sistem yang menerima input atau masukan data dan instruksi, mengolah data sesuai dengan instruksi dan mengeluarkan hasilnya. Definisi Sistem Informasi Pemerintah secara umum merupakan sebuah pengembangan dari kumpulan sistem yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak serta tenaga pelaksanaannya yang bekerja dalam sebuah proses berurutan dan secara bersama-sama saling mendukung mengolah data untuk menghasilkan suatu produk berupa informasi.

Menurut John F. Nash dan Martin B. Roberts dalam (Fauzi, 2017) Suatu sistem informasi adalah suatu kombinasi dari orang-orang, fasilitas, teknologi, media, prosedur-prosedur dan pengendalian yang ditujukan untuk mendapatkan jalur komunikasi penting, memproses tipe transaksi rutin tertentu, memberi sinyal kepada manajemen dan yang lainnya terhadap kejadian-kejadian internal dan

eksternal yang penting dan menyediakan sesuatu dasar untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Zamzami et al., 2021) sistem informasi adalah seperangkat kesatuan dari suatu subsistem saling terkait yang saling bekerja bersama untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan, mengubah, dan mendistribusikan informasi untuk perencanaan, pembuatan keputusan dan pengendalian.

Menurut (Alfani & Nasution, 2022) Sistem Informasi Kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakan teknologi itu untuk mendukung operasi dan manajemen adalah pengertian dari Sistem Informasi. Istilah sistem informasi dalam arti luas sering digunakan merujuk kepada interaksi antara orang, proses algoritmik, data, dan teknologi. Tujuan dari sistem informasi adalah menghasilkan informasi. Sistem informasi adalah data yang diolah menjadi bentuk yang berguna bagi para pemakainya. Data yang diolah saja tidak cukup dapat dikatakan sebagai suatu informasi. Tepat kepada orangnya, tepat waktu, dan tepat nilai adalah tiga pilar yang harus didukung agar informasi yang dihasilkan dapat berguna. Selain yang tidak didukung oleh tiga pilar ini tidak dapat dikatakan sebagai informasi yang berguna, tetapi merupakan sampah (*garbage*).

### **2.1.3.2 Tujuan Sistem Informasi**

Menurut Fauzi (2017) Setiap organisasi harus menyesuaikan informasinya dengan kebutuhan pemakainya. Secara umum tujuan sistem informasi pada perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen. Kepengurusan merujuk ke tanggung jawab manajemen untuk mengatur sumber daya perusahaan secara benar. Sistem informasi menyediakan informasi tentang kegunaan sumber daya ke pemakai eksternal melalui laporan keuangan tradisional dan laporan laporan yang diminta.
2. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen. Sistem informasi memberikan para manajer informasi yang mereka perlukan untuk melakukan tanggung jawab pengambilan keputusan.
3. Untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan harian. Sistem informasi menyediakan informasi bagi personal operasi untuk membantu mereka melakukan tugas mereka setiap hari dengan efisien dan efektif.

Menurut Jermias (2016) Tujuan sistem informasi yaitu :

1. Untuk menyajikan informasi akuntansi kepada berbagai pihak yang membutuhkan informasi tersebut, baik pihak internal maupun pihak eksternal.
2. Untuk mendukung fungsi kepengurusan manajemen suatu perusahaan, karena manajemen bertanggungjawab untuk menginformasikan pengaturan dan penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan tersebut.
3. Untuk mendukung pengambilan keputusan manajemen, karena sistem informasi memberikan informasi yang diperlukan oleh pihak manajemen untuk melakukan tanggungjawab pengambilan keputusan. Dalam mendukung kegiatan operasional perusahaan hari demi hari, sistem

informasi membantu personil operasional untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

#### **2.1.4 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

##### **2.1.4.1 Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Dalam Permendagri No 8 Tahun 2014 Pasal 1 menyebutkan bahwa Sistem Informasi Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Data adalah informasi yang berupa angka tentang karakter atau ciri khusus suatu populasi. Sedangkan Informasi adalah keterangan pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik (Amanah, 2018).

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Dengan kata lain Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 menjadi landasan implementatif pelaksanaan sinkronisasi perencanaan pembangunan dan

penganggaran pembangunan daerah. Untuk pelaksanaannya dibuatlah aplikasi berbasis web yang dinamakan aplikasi SIPD.

SIPD adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah. Setelah diterbitkannya Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, seluruh daerah di wilayah Indonesia harus menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran yang berbasis teknologi dalam hal ini adalah aplikasi SIPD (Ekaputra, 2021).

#### **2.1.4.2 Tujuan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

Menurut Pesak et al. (2021) SIPD memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun tingkat pusat
2. Mempermudah monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Data dan informasi pendukung dalam penyusunan pembangunan daerah arah dan kebijakan
4. Mendukung penetapan prioritas masalah di daerah
5. Meningkatkan kualitas produk kebijakan publik
6. Memajukan potensi ekonomi daerah.

Menurut Amanah (2018) Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) merupakan jaringan yang mengumpulkan data secara terpadu di daerah dan pusat

sebagai dukungan dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah dengan menggunakan teknologi informasi. SIPD memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pengambilan Keputusan, baik di Daerah maupun di Pusat;
2. Memudahkan Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Mendukung Data dan Informasi dalam Penyusunan Arah dan Kebijakan Pembangunan Daerah;
4. Mendukung Penetapan Prioritas Permasalahan di Daerah;
5. Meningkatkan Kualitas Produk-produk Kebijakan Publik,
6. Mempromosikan Potensi Ekonomi Daerah

Menurut Inzany et al. (2022) Penerapan aplikasi berbentuk website ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya untuk dapat mengimplementasikan aplikasi ini pada Pemerintahan Daerah tidak mudah, maka perlu adanya kerjasama antar instansi, penguatan regulasi, serta waktu untuk dapat diimplementasikan dengan seragam bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Mengingat program pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini termasuk proyek strategis untuk pertahanan Nirmiliter Negara.

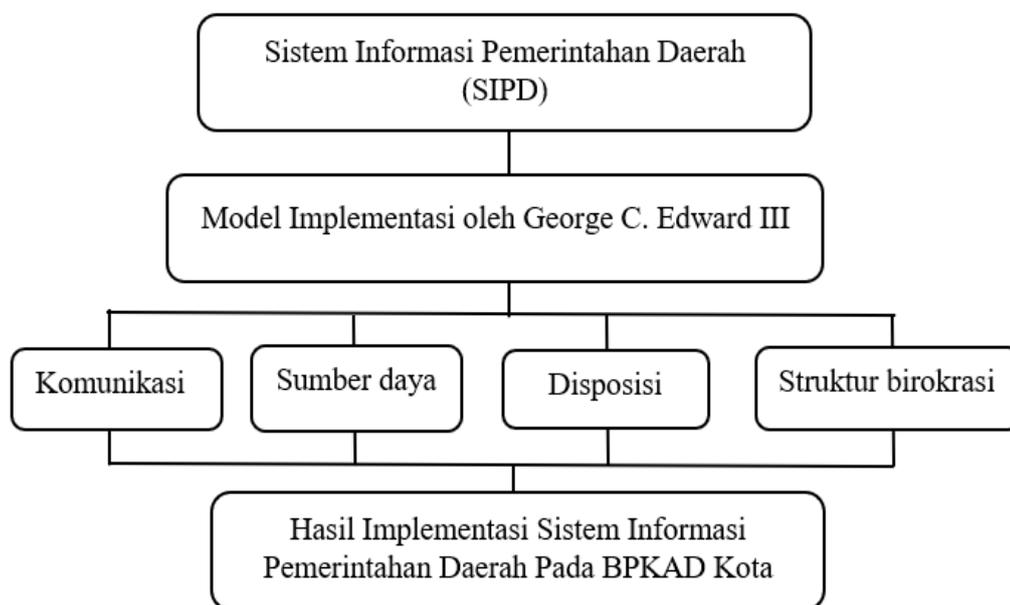
#### **2.1.4.3 Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

1. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi bagi pengambilan keputusan dan kebijakan perencanaan pembangunan baik di daerah maupun pusat;
2. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk membangun pola kerja sama berbasis data dan informasi;
3. Membangun *database* Provinsi, Kabupaten/Kota yang menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki daerah;
4. Mengembangkan sistem informasi pengelolaan database profil daerah yang valid dan akurat

#### **2.2 Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori terhubung dengan indikator yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Oleh karena itu, yang termuat dalam kerangka pemikiran adalah hubungan dari pengaruh, komparatif antara variabel-variabel yang saling terlibat dalam penelitian tersebut, serta menjelaskan tentang variabel-variabel yang saling berkaitan (Darmawan, 2014).

**Gambar 2. 1**  
**Kerangka Pemikiran**



*Sumber : Data diolah 2022*

### 2.3 Penelitian Terdahulu

#### 1. Muhammad Irfan Nasution dan Nurwani

Nasution & Nurwani (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan”. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah adalah suatu sistem informasi yang digunakan di pemerintahan Kota Medan sebagai sistem perencanaan pembangunan daerah, sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah. Namun penerapan SIPD khususnya di Kota Medan belum terlaksana dengan baik karena kualitas sistem yang masih kurang, selain itu kurangnya efisiensi dari segi waktu atau singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan bimbingan teknis menyebabkan banyak

SKPD yang belum terbiasa menggunakan SIPD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan SIPD di Medan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa BPKAD Kota Medan telah menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk menjalankan kebijakan-kebijakan yang diperlukan untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang merupakan program dari Pemerintah Kota Medan. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) berfungsi memuat sistem perencanaan pembangunan daerah dan sistem keuangan daerah, serta sistem pemerintahan daerah lainnya, termasuk sistem pembinaan dan pengawasan pemerintah daerah.

## 2. Dela Alfani dan Juliana Nasution

Alfani & Nasution (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena penelitian ini mengumpulkan data yang objektif melalui penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data, menyajikan data dan menarik kesimpulan. Objek penelitian ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, subjek penelitian ini

adalah Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Hasil dari penelitian ini adalah SIPD merupakan sistem berbasis online yang memberikan kemudahan dalam penyusunan proses perencanaan dan penganggaran. Dari segi waktu, SIPD yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumut menghasilkan informasi data yang lebih baik dan cepat. DPA dan RKA juga merupakan output yang dihasilkan dalam sistem SIPD ini. Berdasarkan analisis melalui poin-poin kualitas yang termasuk kategori yang dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan, ditemukan bahwa penerapan SIPD sudah efektif. Jelas bahwa pegawai di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sumatera Utara merasa pekerjaan lebih mudah dan cepat, meskipun 60-70% pengguna sistem masih belum memahami input dengan jelas, sehingga membutuhkan pengawasan yang lebih.

3. Laudy Fahzura, Najamudin

Fahzura & Najamudin (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat”, sistem Informasi Pemerintah Daerah dibangun untuk mempermudah penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat dan dikembangkan untuk menghasilkan layanan informasi pemerintah daerah berbasis elektronik yang saling terhubung dan terintegrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi data dan wawancara, serta

dianalisis dengan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menggambarkan bahwa implementasi aplikasi sistem Informasi Pembangunan Daerah pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat belum optimal. Hal ini dapat diindikasikan bahwa perilaku Sumber Daya Manusia (SDM) belum siap menghadapi penerapan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di segala bidang karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan di tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah. Oleh karena itu, pemasukan data perencanaan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan pada waktu yang diberikan oleh Bappeda Aceh Barat. Implikasi dari penelitian ini adalah pemerintah daerah berkewajiban memberikan informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang terintegrasi langsung dengan Pemerintah Pusat dalam memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

#### 4. Alfred Salindeho

Salindeho (2017) dalam penelitiannya yang berjudul "*The Role Of Regional Government Information System (SIPD) On The Sub- District Of Aertembaga Financial Accountability*". Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manfaat penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada pertanggungjawaban keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aertembaga. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci dan studi dokumentasi. Informan kunci diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik *triangulasi*

digunakan untuk menguji keabsahan data dan sumber data. Data transkrip yang dijelaskan dari wawancara dianalisis menggunakan metode analitik terdiri dari memberi tema/*coding*, mengkonseptualisasikan pernyataan ilmiah dan menginterpretasikannya dalam bentuk naratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manfaat penggunaan SIPD terhadap akuntabilitas keuangan di Pemerintah Kabupaten Aertembaga membuat penginputan rencana anggaran tepat waktu, relevan dan mudah dilakukan.

5. Pricilia Joice Pesak, Novia Cynthia Maradesa, Agnes Eyne, dan Ahmad Gazali

Pesak et al. (2021) dalam penelitiannya yang berjudul “*Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bitung City Government*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SIPD di BPKAD Kota Bitung, apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan SIPD di BPKAD Kota Bitung, dan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bitung dalam mengatasi kendala pelaksanaan SIPD di BPKAD Kota Bitung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara dengan informan kunci dan studi dokumentasi. Informan kunci diwawancarai dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dan sumber data. Data transkrip yang dideskripsikan dari wawancara dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang terdiri dari pemberian tema/*coding*, mengkonseptualisasikan pernyataan ilmiah dan

menginterpretasikannya dalam bentuk naratif. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut digunakan teori implementasi kebijakan publik.

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017), jenis penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara *triangulasi* (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Metode penelitian kualitatif dalam penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Menurut Bahari (2018) penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan suatu keadaan atau objek yang menjadi perhatian dalam kegiatan penelitian secara sistematis, penelitian deskriptif dilakukan untuk menganalisis satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau yang lain, sehingga jarang ditemukan rumusan hipotesis.

#### **3.2 Jenis dan Sumber Data**

Pada penelitian ini, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Berikut data primer dan data sekunder yaitu:

##### **3.2.1 Data Primer**

Menurut Indriantoro & Supomo (2018) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. Sumber data pada penelitian ini adalah beberapa

pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang yang terlibat dalam proses implementasi SIPD.

### **3.2.2 Data Sekunder**

Menurut Indriantoro & Supomo (2018) data sekunder merupakan sumber penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumentasi) yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Dan data sekunder ini diperoleh baik melalui internet maupun dokumentasi dan dokumen lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang.

### **3.3 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2017).

Untuk memperoleh data yang dihendaki, peneliti menggunakan pengelolaan data sekunder dengan cara wawancara atau pengumpulan data untuk memperoleh informasi-informasi yang dibutuhkan :

#### **1. Wawancara**

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Teknik wawancara dilakukan jika peneliti memerlukan komunikasi atau hubungan dengan reponden. Data yang dikumpulkan umumnya berupa masalah tertentu

yang bersifat kompleks, sensitive, atau kontroversial, sehingga kemungkinan jika dilakukan dengan teknik kuesioner akan kurang memperoleh tanggapan responden (Indriantoro & Supomo, 2018).

## 2. Observasi

Observasi merupakan proses pengumpulan data dengan melakukan pencatatan atas perilaku seseorang atau suatu peristiwa dengan pengamatan secara langsung dan tanpa melalui proses pertanyaan. Instrumen yang digunakan dalam observasi adalah panduan pengamatan dan lembar pengamatan (Bahari, 2018).

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada penelitian, serta dokumen yang diteliti dapat terdiri dari berbagai jenis dan tidak hanya dokumen resmi, bisa berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, dan dokumen lainnya (Bahari, 2018).

## 4. Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan untuk mengambil data yang bersifat teori dan digunakan sebagai literatur pendukung untuk mendukung penelitian yang sedang berlangsung. Data yang didapatkan dari buku-buku sumber yang dapat dijadikan sebagai referensi terkait masalah yang akan diteliti.

### **3.4 Teknik Pengolahan Data**

Teknik pengolahan data adalah proses data yang diolah sebelum memulai analisa. Teknik pengolahan data disebut juga sebagai teknik analisis data. Melalui teknik pengolahan data, maka data mentah yang dikumpulkan peneliti sangat berguna. Data yang sudah terkumpul dapat dengan mudah dianalisis

setelah itu diperoleh arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah (Sudaryono, 2017). Proses analisis data menurut Miles dan Huberman dalam (Sugiyono, 2017) terdiri dari tiga, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan peneliti sangat mudah untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing / Verification*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dalam penelitian ini, peneliti akan menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang akan dilakukan di lapangan.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017) teknik analisis data diartikan sebagai suatu proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang biasanya diperoleh dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami, dan kemudian temuannya dapat diinformasikan/ disampaikan kepada orang lain.

Teknik analisis data di sini yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor tentang implementasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tanjungpinang. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh dari berbagai macam sumber, dilakukan secara berlangsung dengan berbagai jenis teknik pengumpulan data, (Sugiyono, 2017) menyatakan analisis dimulai dengan perumusan dan penjelasan suatu masalah, sebelum dilakukan penelitian di lapangan sampai akhir penulisan hasil penelitian, dibuat dalam bentuk laporan. analisis data dalam sebuah penelitian dapat dilakukan melalui 3 kegiatan secara bersamaan yaitu diartikan mengenai analisis data kualitatif yaitu merupakan upaya yang berkelanjutan, berulang, dan menerus.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi ke-2)*. CV. Alfabeta.
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6 Nomor 1, 4036–4043.
- Amanah, N. (2018). *Implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah Di Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Serang*. 1–54.
- Bahari, S. (2018). *Metodelogi Penelitian Bisnis-Lengkap dengan Teknik Pengolahan data SPSS*. CV Andi Offset.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. UMSIDA Press.
- Chasanah, K., Rosyadi, S., & Kurniasih, D. (2017). Implementasi Kebijakan Dana Desa. *The Indonesian Journal of Public Administration (IJPA)*, 3(2), 12–32. <https://doi.org/10.52447/ijpa.v3i2.921>
- Darmawan, D. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif*. PT REMAJA ROSDAKARYA.
- Ekaputra, N. D. (2021). *Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk Nanda*. 21(April), 6.
- Fahzura, L., & Najamudin. (2022). Implementasi Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ( SIPD ) pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(1), 7–13. <https://journal.pencerah.org/index.php/jspi/article/view/66>
- Fauzi, R. A. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi (Berbasis Akuntansi)*. Cv Budi Utama.
- Ghozali, I. (2020). *25 Grand Theory*. YOGA PRATAMA.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi sektor publik : dilengkapi 100 soal latihan dan jawaban* (A. Pratomo (ed.)). Poliban Press.
- Hantono. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. MEDIA SAINS INDONESIA.
- Indriantoro, N., & Supomo, B. (2018). *Metode Penelitian Bisnis*. CV Andi Offset.
- Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, Purwanto, S. A., & Prihantoro, K. (2022). *Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah*. 2(10), 3573–3588.
- Jermias, R. R. W. (2016). Analisa Sistem Informasi Akuntansi Gaji Dan Upah Pada PT. BANK SINARMAS Tbk. MANADO. *Jurnal Riset Ekonomi*,

*Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 814–828.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/13180>

Kawatu, F. S. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. DEEPPUBLISH.

Mardiasmo. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (IV)*. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Terbaru*. Cv. Andi Offset.

Muslih, M., Rahadi, D. R., & Marbun, S. O. (2020). Tata Kelola Pemerintahan Berkelanjutan Untuk Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah. *Konferensi Nasional Ilmu Administrasi, February*, 1–7.

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021a). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Nasution, M. I., & Nurwani. (2021b). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109. <https://doi.org/10.29103/jak.v9i2.4577>

Pesak, P. J., Maradesa, N. C., Eyne, A., Gazali, A., & Salindeho, A. (2021). *Analysis of Local Government Information System (SIPD) Implementation at Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah ( BPKAD ) Bitung City Government*. 8.

Purwanto, E. A., & Sulisyastuti, D. R. (2015). *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi di Indonesia*. Gava Media.

Salindeho, A. (2017). *The Role Of Regional Government Information System (SIPD) On The Sub- District Of Aertembaga ' S Financial Accountability*. 2017–2020.

Siregar, B. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual)* (Kedua). UPP STIM YKPN.

Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian: Metodologi penelitian Skripsi*. Rajawali Pres.

Sudaning, N. K., & Seputra, K. A. (2019). Peran Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Menunjang Peningkatan Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah. *Locus Majalah Ilmiah FISIP*, 11(2), 1–22.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta.

Syahrudin. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori, dan Studi Kasus*. Nusa Media.

- Wartini, N. N., & Yasa, I. G. W. M. (2016). Analisis Efektivitas Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Pemerintah Kabupaten Jembrana. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas*, 5, 1411–1438.
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado*. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksektif/article/view/31423>
- Zamzami, F., Nusa, N. D., & Faiz, I. A. (2021). *Sistem Informasi Akuntansi*. Gadjah Mada University Press.

## ***CURRICULUM VITAE***



### **I. DATA PRIBADI**

Nama Lengkap : Munawir Jauhari  
Tempat/Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 18 April 1999  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Alamat : Jl. D.I Panjaitan Km. 8 Perum Taman Persona Asri  
Usia : 23 Tahun  
Agama : Islam  
Nomor *Handphone* : 0811-7011-146  
E-mail : [munawirj18@gmail.com](mailto:munawirj18@gmail.com)

### **II. DATA KELUARGA**

Ayah Kandung : Marzul Hendri  
Ibu Kandung : Restuty

### **III. RIWAYAT PENDIDIKAN**

<b>PENDIDIKAN FORMAL</b>		
<b>JENJANG</b>	<b>INSTITUSI</b>	<b>TAHUN</b>
<b>SD</b>	SDIT AL-Madinah	2005 – 2011
<b>SLTP</b>	SMP Negeri 5 Tanjungpinang	2011 – 2014
<b>SLTA</b>	SMA Negeri 1 Tanjungpinang	2014 – 2017
<b>S1</b>	STIE Pembangunan Tanjungpinang Program Studi Akuntansi	2018 – 2023